



KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
Nomor: 1050 /KPA.W11-A16/PW1.1.1/VII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA KUDUS

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi Pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Kudus, maka dipandang perlu memperbarui Kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: 35/KPA.W11-A16/PW/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kudus;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Agama mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;

c. Bahwa tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 dan KMA/145/SK/VII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan;

d. Bahwa untuk dapat mengintensifkan pengawasan tersebut, maka perlu diadakan penunjukan dan pembagian dalam bidang pengawasan administrasi;

e. Bahwa tata cara pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut telah dilengkapi pula petunjuk pelaksanaannya;

f. Bahwa para hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas pengawasan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

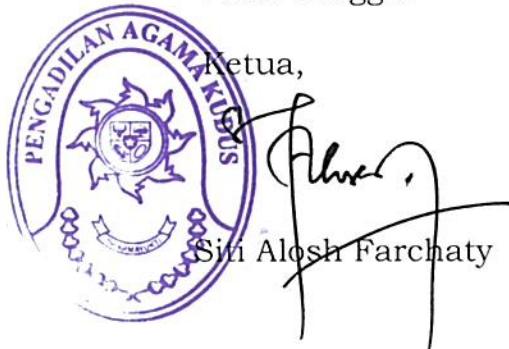
- 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/001/SK/I/1991;
 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/004/SK/II/1994;
 6. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/005/SK/III/1994;
 7. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006;
 8. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/145/SK/VIII/2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA KUDUS
- KESATU : Memilah bidang pengawasan menjadi enam kelompok yaitu Bidang Administrasi Perkara, Pelayanan Publik, Administrasi Persidangan, Manajemen Peradilan, Administrasi Umum, Website, IT dan SIPP;
- KEDUA : Menunjuk Hakim Pengadilan Agama Kudus yang namanya tercantum dalam lajur kedua menjadi Hakim Pengawas Bidang yang tercantum dalam lajur empat daftar lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Hakim Pengawas agar melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus secara periodik;
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya yang berkaitan Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan
Pada Tanggal

: di Kudus
: 01 Juli 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
Nomor : /KPA.W11-A16/P1.1.1/VII/2025
Tanggal : 01 JULI 2025

SUSUNAN PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BIDANG PENGAWASAN/PEMBINAAN
1	2	3	4
1	Rohayatun, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	KOORDINATOR PENGAWAS BIDANG
2	Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.	Hakim	Managemen Peradilan : Program Kerja, Pelaksanaan/Pencapaian Target, RKAKL, SOP, Job Discription, Pembinaan SDM, Ketertiban dan Kedisiplinan.
3	Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.	Hakim	Administrasi Umum : Kepegawaian dan Keuangan DIPA, SAKIP, Inventaris, Persuratan, Perpustakaan dan Kebersihan.
3	Ana Latifatuz Zahro, S.H.I., M.H. dan Riski Lutfia Fajrin, S.H., M.H.	Hakim	Administrasi Perkara: Proses Penerimaan Perkara, Kinerja PTSP, Register Perkara, Keuangan Perkara, Laporan Perkara, Akte Cerai dan Arsip Perkara.
4	Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.	Hakim	Administrasi Persidangan: PMH, PHS, Penetapan Penunjukan Panitera Sidang dan Jurusita/Jurusita Pengganti, Proses Persidangan, Relaas dan PBT, Berita Acara Sidang dan Minutasi
5	Achmad Sutiyono, S.H.I., M.H.	Hakim	Pelayanan Publik, Website, IT dan SIPP: Resepsionis, Meja Informasi, Pengaduan dan Mediasi Organisasi dan Penanggungjawab, Updating, Jaringan dan Master.

